

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
ANGGARAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Tumpal Manik, M.Si
(Universitas Maritim Raja Ali Haji)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis secara parsial dan simltal faktor - faktor yang mempengaruhi pendapatan anggaran belanja daerah melalui belanja modal, *dana perimbangan*, pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Data penelitian mulai tahun 2010 - 2014, terdiri dari dua kota dan lima kabupaten. Jumlah data penelitian sebanyak 35 data. Pengujian hipotesisi melalui Uji Asumsi Klasik, Uji T, Uji F dan Uji Determinasi dengan program statistic SPSS V.22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menunjukan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, antara lain : belanja modal berpengaruh sebesar 78%, dana perimbangan berpengaruh sebesar 85,4% dan pendapatan asli daerah berpengaruh sebesar 70,1% terhadap terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota Propinsi Kepulauan Riau. Secara simultan berpengaruh signifikan sebesar 88,3%

Kata Kunci : belanja modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2011), dengan sistem pengendalian penggunaan anggaran berbasis kinerja. Tanggung jawab penyusunan dari laporan keuangan tersebut, ditegaskan secara eksplisit dengan membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI)

Berdasarkan SAP (2010), bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebijakan dalam SAP tersebut termasuk untuk Provinsi Kepulauan Riau, yang mana pemerintah pusat maupun daerah seperti Gubernur, Walikota, Bupati, dan Camat bertanggung jawab atas laporan keuangan yang telah disusun dan dilaporkan dalam setiap periode pelaporan keuangan pemerintahan, sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seperti tertuang dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, UU No. 29/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah belum meningkatkan kekuatan

fiskal (fiscal power) bagi pemerintah kabupaten dan kota, hal ini menyebabkan pemerintah daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat.

Sesuai dengan kebutuhan daerah, maka dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekwensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah untuk mengelola keuangan daerah, maka menilai kinerja pemerintah daerah melalui beberapa aspek rasio keuangan yang diperoleh dari persentase serapan penggunaan anggaran, termasuk peningkatan jumlah penggunaan anggaran masing - masing daerah.

Hasil penelitian yang berhubungan dengan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah seperti belanja modal berpengaruh negative terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung, sedangkan secara tidak langsung Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli daerah sebagai variabel intervening (Fajar Nugroho, 2012). Sesuai dengan Dhia (2012), dan Julitawati (2012), Pendapatan asli daerah dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut penelitian Nababan (2008), Indikator kinerja yang digunakan dalam pencapaian sasaran adalah pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat *outcome*. Penelitian Sapta Ningsih Sumarmi (2008), Secara simultan dan parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian sebelumnya ingin dibuktikan oleh peneliti untuk pemerintah kota dan kabupaten di Propinsi Kepulauan Riau, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dalam penelitian ini bentuk pertanyaan sebagai berikut: (1) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014? (2) Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014? (3) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014? (4) Apakah secara simultal belanja modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah antara lain : (1)

Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014, (2) Untuk mengetahui pengaruh *dana perimbangan* terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014, (3) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014, (4) Untuk mengetahui secara simultan pengaruh belanja modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PEGENBANGAN HIPOTESIS

2.1 Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Belanja modal (*Capital Expenditure*) meruokan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (SAP, No.2, 2011),

Menurut Wijaya (2007), belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu (a) Belanja Modal Tanah yakni pengeluaran, biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu belanja peralatan dan Mesin. (c) Belanja modal gedung dan bangunan yaitu pengeluaran, yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan. (d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yaitu elanja untuk jalan, irigasi dan jaringan, (e) Belanja modal fisik lainnya yaitu belanja fisik lainnya untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya.

Belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri atas belanja tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat- alat persenjataan dan keamanan, Menurut Ardhini (2011),

Belanja modal dipertegas dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan definisi, dimana PKKD berarti adalah "peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Belanja termasuk Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya".

Menurut Kuncoro (2004), Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan. Berdasarkan teori diatas, maka pengembangan hipotesis dalam variable ini adalah

H1 : Diduga Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.2 Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan Daerah

Dana perimbangan adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. terbagi dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dari provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Widjadja (2010), dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, sedangkan menurut Sumiyarti(2005), sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah Pusat.

Menurut Sumarjo(2010), dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara Lesmana (2010, sedangkan menurut Patrick (2007), adanya pengaruh negatif dana perimbangan terhadap inovasi dan Liestiani (2010), mengadopsi dana perimbangan menjadi variabel tingkat ketergantungan, merupakan rasio dana alokasi umum pada Pemerintah pusat.

Penelitian Martani (2010), tidak menemukan adanya hubungan antara tingkat ketergantungan Pemerintah daerah terhadap dana dari Pemerintah pusat dengan tingkat pengungkapan. Sedangkan, Sumarjo (2010) menemukan adanya pengaruh positif dana perimbangan terhadap kesesuaian pengungkapan wajib Pemerintah daerah dan memproksikan *dana perimbangan* dengan rasio .

Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Berdasarkan teori diatas, maka pengembangan hipotesis dalam variable ini adalah

H2 : Diduga Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.3 Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 18, Sumber Pendapatan Asli Daerah, diperoleh dari:(1) Pajak Daerah Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, (2) Retribusi Daerah yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni kontribusi tersebut dapat berupa deviden, (4) Lain-lain PAD yang sah dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah memiliki perbedaan antar wilayah, sesuai dengan kondisi dan bidang perekonomian yang berkembang di masing-masing daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang

digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Sumarjo (2010), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut.

Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Berdasarkan teori diatas, maka pengembangan hipotesis dalam variable ini adalah

H3 : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.4. Kinerja Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah pusat, tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat terwujud jika entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan sistem akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (2011), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja keuangan daerah yang akan menghasilkan kualitas laporan keuangan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apakah belanja modal, dana perimbangan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Rasio Kemandirian Daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah. Sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu.

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input, dapat ditunjukkan dengan rumus (Mardiasmo, 2009), kinerja pemerintah daerah diukur dengan nilai efisiensi yaitu output dibagi dengan input untuk satuan kerja. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan organisasi, lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

Penggunaan anggaran pemerintah daerah disesuaikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak terlepas dari SKPD. Menurut Bastian (2006), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh seseorang, kelompok maupun organisasi dalam periode tertentu yang telah ditentukan dan dapat diukur dengan angka statistis ataupun mencapai keberhasilan yang memberikan kontribusi tambahan nilai dan manfaat.

Menurut Mardiasmo (2009), Tujuan dan peranan pengukuran kinerja adalah: a). Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*). b). mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang, c). mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*. d). Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menekankan pada prinsip *money follows function* sebagai konsekuensi dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembaharuan subjek pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah ekonomis, efektifitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Berdasarkan teori diatas, maka pengembangan hipotesis dalam variable ini adalah

H4 : Diduga Pendapatan Asli, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2011). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (X1), Dana Perimbangan(X2), Pendapatan Asli Daerah (X3). Sedangkan variabel terikat adalah Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten (Y) pada kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.

3.2. Tempat dan Populasi Penelitian

Populasi adalah terdiri dari Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kab. Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga.

Sedangkan populasi penelitian adalah laporan keuangan daerah dan realisasi anggaran pemerintah daerah untuk wilayah kota dan kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau dan periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2008 sampai 2012, dan data times series (runtun waktu) yang diistilahkan dengan nama data *pooled cross section-times series*.

3.3. Sampel dan Data Penelitian

Sampel penelitian diperoleh dari laporan keuangan daerah dan realisasi anggaran dua pemerintah kota (Tanjungpinang dan Batam) dan lima kabupaten (Bintan, Karimun, Anambas, Natuna dan Lingga) periode tahun 2010-2014, sejumlah 35 data yang diperoleh melalui website pemerintah daerah kota dan kabupaten, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, website Direktorat Jenderal Anggaran Republik Indonesia (<http://djpk.depkeu.go.id>), dan Kementerian keuangan RI melalui online website (<http://djpk.depkeu.go.id>)

3.4. Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat (*Dependent variable*) dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Propinsi Kepulauan Riau dengan proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kota dan kabupaten digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio antara output dengan input, dapat ditunjukkan dengan rumus (Mardiasmo, 2009) dan Hastuti, (2011).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \dots \dots \dots .1)$$

Dimana, Input adalah realisasi penerimaan, sedangkan output adalah realisasi pengeluaran diukur baik dalam jumlah uang ataupun fisik (Mardiasmo, 2009).

Pengujian variabel independen terdiri dari tiga variabel bebas yaitu : Belanja Modal (X1), Dana Perimbangan (X2) dan variabel Pendapatan Asli Daerah (X3).

a. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak

berwujud. Belanja modal dapat dihitung dengan rumus berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \text{Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan} \\ &\text{Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan +} \\ &\text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} \dots\dots\dots 2) \\ &\text{+Belanja Aset Tetap Lainnya} \end{aligned}$$

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Rumus menghitung , sesuai dengan UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Dana Perimbangan} &= \text{Dana Bagi Hasil +} \\ &\text{Dana Alokasi Umum +} \dots\dots\dots 3) \\ &\text{Dana Alokasi Khusus} \end{aligned}$$

c. Pendapatan Asli Daerah

PAD dihitung berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{PAD} &= \text{Pajak Daerah + Retribusi Daerah +} \\ &\text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah} \\ &\text{yang Dipisahkan + Lain - lain PAD} \dots\dots\dots 5) \\ &\text{yang Sah} \end{aligned}$$

3.6. Metode Analisis Penelitian

Untuk menentukan tingkat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis statistik digunakan model analisis dalam bentuk persamaan regresi linier berganda dalam rumus :

$$\begin{aligned} Y &= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \\ \text{KKD} &= \beta_0 + \beta_1 \text{BM} + \beta_2 \text{DP} + \beta_3 \text{PAD} + \end{aligned}$$

Dimana :

- KKD = Kinerja Keuangan Daerah (Y)
- BM = Belanja Modal (X1)
- DP = Dana Perimbangan (X2)
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (X3)
- = Tingkat kesalahan pengganggu

3.7. Pengujian Hipotesis

Memperoleh hasil penelitian, peneliti melakukan pengolahan dan pengujian data melalui (a) Asumsi Klasik, yakni melalui empat uji asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji asumsi heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas. (b) Pengujian Hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengeruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Uji-F (Uji secara Simultan atau Bersamaan, Uji-T (Uji Parsial atau Uji Masing-masing Variabel) dan uji Koefisien Determinasi (R²)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Asumsi Klasik

Salah satu syarat untuk menguji penelitian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik agar tidak terjadi bias. Pengujian asumsi klasik terdiri dari empat pengujian, yaitu uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan juga uji multikolinearitas.

Tabel 1.1
Uji Asumsi Klasik

Keterangan		Nilai		
N		35		
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,664		
Durbin-Watson		2,129		
R Square		0,883		
Adjusted R Square		0,767		
Keterangan Variabel	Collinearity Statistics		Uji Gletsjer	
	Tolerance	VIF	t	Sig.
(Constant)	0,734	3,590	0,044	0,877
BM (X1)	0,832	4,151	0,058	0,551
DP (X2)	0,756	5,051	0,061	0,715
PAD (X3)	0,791	5,350	0,053	0,602

Sumber : Output SPSS V.22, (2015)

BM : Belanja Modal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

KKD : Kinerja Keuangan Daerah

4.2 Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2
Uji Hipotesis Pertama (H1, H2 dan H3)

Keterangan		Nilai	
R Square		0,883	
Adjusted R Square		0,767	
Durbin-Watson		2,129	
F Hitung Anova		3,001	
F Hitung Probabilitas (Sig)		0,004	
Keterangan Variabel	Koefisien (B)	T _{hitung}	Probabilitas
(Constant)	6,514		0,000
BM (X1)	0,780	4,013	0,003
DP (X2)	0,854	4,687	0,000
PAD (X3)	0,701	3,563	0,040

Dependent Variable: Kinerja Keuangan.

Sumber : Output SPSS V.22, (2015)

Dari tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa nilai R² (koefisien determinasi) sebesar 0,883 yang artinya bahwa

persamaan model analisis hipotesis satu memberikan penjelasan bahwa belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah sebesar 88,3% pada daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan 11,7% disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model ini.

Hasil Uji-F hipotesis penelitian secara simultan (Uji-F) ditunjukkan dalam tabel 1.2 diatas nilai signifikan sebesar 0,004 yakni $0,004 > 0.05$ artinya secara bersamaan (BM, DP dan PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota Propinsi Kepulauan Riau.

Hasil Uji-T hipotesis penelitian secara parsial menunjukkan semua varibel penelitian berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota Propinsi Kepulauan Riau, antara lain : Belanja Modal berpengaruh sebesar 78%, Dana Perimbangan berpengaruh sebesar 85,4% dan Pendapatan asli daerah berpengaruh sebesar 70,1% terhadap terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota Propinsi Kepulauan Riau. Model hipotesis dalam persamaan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= 0 + 1 X_1 + 2 X_2 + 3 X_3 + \\
 KKD &= 0 + 1 BM + 2 DP + 3 PAD + \\
 KKD &= 6,514 + 0,780 BM + 0,854 DP + 0,701 PAD +
 \end{aligned}$$

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah, peneliti telah mengetahui hasil dari tujuan penelitian ini yaitu :

1. Hipotesis 1 (H1); Belanja Modal mempunyai pengaruh sebesar 78% terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota Propinsi Kepulauan Riau.
2. Hipotesis 2 (H2); Dana Perimbangan mempunyai pengaruh sebesar 85,4% terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota Propinsi Kepulauan Riau.
3. Hipotesis 3 (H3); Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh sebesar 70,1% terhadap terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota Propinsi Kepulauan Riau.
4. Secara simltal vabel penelitian mempengaruhi kinerja keuangan daerah sebesar 76,7% pada daerah kabupaten dan kota Propinsi Kepulauan Riau

5.2 Saran Penelitian Selanjutnya

Karena keterbatasan - keterbatasan yang dikemukakan diatas maka penulis menyadari bahwa penelitian ini untuk dikembangkan bagi penelitian selanjutnya untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang, penulis mengajukan saran-saran agar menambah wilayah penelitian dan tahun.

5.3 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh secara signifikan Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengikat kinerja dan melakukan evaluasi kinerja sehingga akan menjadi daya Tarik bagi calon investor di Provinsi Kepulauan Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini (2011), Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Hastuti, Widya Mustikarini dan Debby Fitriyasari, (2010), Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Universitas Indonesia.
- Bastian, Indra. (2006), *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- BPK, Kementrian Keuangan RI (2010), Sinergi Pusat dan Daerah dalam Perspektif
- Dhia, Cherrya Wenny. (2012), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan, Jurnal Ilmiah STIE MDP
- Endah, Vegasari Kusumawati. (2011), Faktor-Faktor yang Menentukan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Indonesia Survei pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Tengah. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Jubaedah, Dedah. (2005), Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia
- Julitawati, Ebit Darwis dan Jalalidin, (2012), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Di Provinsi Aceh. Magister Akutansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
- Patrick, Patricia A. (2007), *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States - Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Martani, Dwi. & Liestiani, Annisa. (2010), *Local Government Financial Statement Disclosure in Indonesia. Conference Proceedings: Asian Academic Accounting Association*
- Nababan, Pukka B.E. (2008), Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Kasus Pada Bapeda Pemkab Serdang Bedagai, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Sumatera Utara.
- Ningsih, Sapta Sumarmi. (2008), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta. Fakulatas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Nugroho, Fajar. (2012), Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Standar Akuntansi Pemerintahan (2011), Tim Fokus Media
- Sugiyono. (2011), Metode Penelitian. Kombinasi *Mixed Methods*, Alfabeta. Bandung.

- Sumiyarti dan Akhmad Fauzan Imamy, 2005. *Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-Daerah terhadap Perekonomian Kota Depok*. Media Ekonomi, Vol. 11, No. 2.
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Manik, Tumpal (2014), Analisis Pengaruh Industri Maritim Melalui Transportasi Perhubungan Laut, Pariwisata Bahari, Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Aset (Studi Di Propinsi Kepri Melalui Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Ekonomi Maritim Indonesia (JEMI) Vol.5 No.2 Desember Tahun 2014. FE UMRAH.
- Widjaja, HAW. (2007), Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Wijaya. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.